

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR: 800/Kep.3329-ORG/2025  
TENTANG  
FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PRANATA KOMPUTER

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4373/M.SM.01.00/2024 tanggal 20 September 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.  
KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Pranata Komputer, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Agustus 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP 19760604 200604 1 002

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR 800/Kep.3329-ORG/2025**  
**TENTANG FORMASI KEBUTUHAN**  
**JABATAN FUNGSIONAL PRANATA**  
**KOMPUTER**

**FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL**  
**PRANATA KOMPUTER**

NO	PERANGKAT DAERAH	JENJANG JABATAN						JUMLAH	
		KETERAMPILAN			KEAHLIAN				
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA		
1	Sekretariat Daerah				1			1	
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1						1	
3	Inspektorat Daerah				1			1	
4	Dinas Pendidikan				3	1		4	
5	Dinas Kesehatan				3	1		4	
	a. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung	2	1	1	1	1		6	
	b. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari	2	1	1	1	1		6	
	c. Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut	1	1	1	2	1		6	
6	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga			1	1	1		3	
7	Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang				2			2	
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				1			1	
9	Dinas Sosial				2			2	
10	Dinas Ketenagakerjaan				2			2	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1			1	
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				1			1	

NO	PERANGKAT DAERAH	JENJANG JABATAN						JUMLAH	
		KETERAMPILAN			KEAHLIAN				
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA		
13	Dinas Lingkungan Hidup				2	1		3	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1		1			4	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika				20	18	5	43	
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah				1			1	
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian				1			1	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				2	1		3	
19	Dinas Pemuda dan Olahraga				1			1	
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				1			1	
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan				2			2	
22	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				1			1	
23	Satuan Polisi Pamong Praja				1			1	
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1		1	1	1		4	
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				4	5		9	
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah		1		1			2	
27	Badan Pendapatan Daerah				1	1		2	
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				1			1	
29	Kecamatan Andir	2						2	
30	Kecamatan Antapani	2						2	

NO	PERANGKAT DAERAH	JENJANG JABATAN						JUMLAH	
		KETERAMPILAN			KEAHLIAN				
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA		
31	Kecamatan Arcamanik	2						2	
32	Kecamatan Astana Anyar	2						2	
33	Kecamatan Babakan Ciparay	3						3	
34	Kecamatan Bandung Kidul	2						2	
35	Kecamatan Bandung Kulon	3						3	
36	Kecamatan Bandung Wetan	2						2	
37	Kecamatan Batununggal	4						4	
38	Kecamatan Bojongloa Kaler	2						2	
39	Kecamatan Bojongloa Kidul	3						3	
40	Kecamatan Buahbatu	2						2	
41	Kecamatan Cibeunying Kaler	2						2	
42	Kecamatan Cibeunying Kidul	3						3	
43	Kecamatan Cibiru	2						2	
44	Kecamatan Cicendo	3						3	
45	Kecamatan Cidadap	2						2	
46	Kecamatan Cinambo	2						2	
47	Kecamatan Coblong	3						3	
48	Kecamatan Gedebage	2						2	
49	Kecamatan Kiaracondong	3						3	
50	Kecamatan Lengkong	4						4	
51	Kecamatan Mandalajati	2						2	
52	Kecamatan Panyileukan	2						2	
53	Kecamatan Rancasari	2						2	
54	Kecamatan Regol	4						4	
55	Kecamatan Sukajadi	3						3	

NO	PERANGKAT DAERAH	JENJANG JABATAN						JUMLAH	
		KETERAMPILAN			KEAHLIAN				
		TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA		
56	Kecamatan Sukasari	2						2	
57	Kecamatan Sumur Bandung	2						2	
58	Kecamatan Ujungberung	3						3	
	JUMLAH	84	5	5	63	33	5	195	

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002